

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada ALLAH SWT, karena atas Rahmat dan Karunianya sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan judul " **SOSIOLOGI PEMBANGUNAN DESA**". Buku ini secara sosiologis membahas mengenai peristiwa-peristiwa dalam pembangunan desa dilihat dari fenomena keterbelakangan, sehingga diperlukan adanya pembangunan desa sebagai gerakan nasional untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di pedesaan. Pembangunan desa yang dilaksanakan perlu didukung dengan fondasi yang kuat melalui pelaksanaan kewenangan desa .

Berbagai program dan kegiatan pembangunan masyarakat desa sesuai periode pemerintahan di Indonesia mulai dari periode Orde Baru sampai periode Reformasi kelihatannya kurang berjalan secara optimal karena kurang jelasnya kewenangan desa dan terbatasnya anggaran pembangunan desa. Setelah ditetapkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, baru terjadi peningkatan anggaran desa yang bersumber dari APBN yang dikenal dengan Dana Desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa terdapat beberapa fenomena yang terjadi seperti fenomena wisata pembangunan desa, bias perkotaan dalam pembangunan masyarakat desa , dan kooptasi institusi lokal di pedesaan. Dengan menguatnya komitmen pemerintah untuk membangun desa melalui " NAWACITA" , pada urutan ke 3 yaitu, " Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya tidak berjalan mulus karena adanya patologi pembangunan desa yang cukup memengaruhi akselerasi pembangunan desa.

Meskipun terjadi kondisi patologis, namun pembangunan masyarakat desa tetap dilaksanakan secara berkelanjutan karena melihat kondisi obyektif penduduk Indonesia masih dominan bertempat tinggal di pedesaan. Dilihat dari tingkat kesejahteraan mereka masih rendah sehingga wajar jika pembangunan masyarakat desa masih merupakan prioritas utama di Indonesia.

Buku ini disusun dengan maksud untuk menambah literatur mata kuliah Pemerintahan Desa sesuai yang diampu penulis di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan. Selain itu dapat pula dijadikan bahan referensi bagi Pemerintah desa dan *stakeholder* yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa yang dikaji dalam perspektif sosiologi sesuai periode pemerintahan. Dalam pelaksanaannya disamping telah ada kemajuan yang dicapai namun ada pula hambatan karena adanya

kondisi patologis dalam pembangunan desa, sehingga diperlukan pembangunan desa berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pembahasan dalam buku ini akan diuraikan dalam 10 (sepuluh) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Diawali dengan pembahasan mengenai keterbelakangan dan pembangunan. Keterbelakangan yang dialami negara-negara berkembang merupakan warisan kolonial, sehingga untuk keluar dari keterbelakangan diadopsi pembangunan dari negara maju. Pembangunan menjadi kekuatan baru, namun dalam implementasinya pembangunan tidak hanya memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat tetapi juga pembangunan memberikan dampak negatif dengan terjadinya krisis pembangunan.

BAB II DINAMIKA PEMBANGUNAN DESA. Menguraikan desa sebagai prioritas pembangunan yang didalamnya terdapat tinjauan historis pembangunan desa, prinsip pembangunan masyarakat desa dan akselerasi pembangunan desa. Selain itu dijelaskan pula mengenai desa dalam proses perubahan baik secara alami maupun karena sentuhan pembangunan dan prestasi pembangunan desa dalam berbagai bidang yang pernah dicapai selama ini, seperti swasembada pangan, termasuk kemudahan informasi yang telah mengubah cara hidup tradisional menuju masyarakat modern.

BAB III PONDASI PEMBANGUNAN DESA. Menjelaskan mengenai pentingnya kewenangan desa sebagai fondasi pembangunan desa. Untuk itu dibahas mengenai pengertian kewenangan desa, jenis-jenis kewenangan desa dan pelaksanaan kewenangan desa. Secara empiris ada kekhawatiran jika kewenangan desa hanya merupakan retorika tanpa implementasi, maka desa akan mengalami ketergantungan secara permanen dengan pemerintah di atasnya (supradesa). Apabila hal ini terjadi maka otonomi desa jauh dari harapan masyarakat desa sehingga desa semakin jauh dari kemandirian.

BAB IV DESKRIPSI PROGRAM DAN INSTITUSI PEMBANGUNAN DESA. Menguraikan tentang pelaksanaan pembangunan desa serta institusinya berdasarkan periode pemerintahan mulai dari periode orde

baru, orde reformasi dan periode setelah di tetapkannya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pada Bab ini pula dijelaskan distribusi program berdasarkan kegiatan dengan mengacu kepada 8 indikator utama dan distribusi program berdasarkan wilayah dengan membagi 7 wilayah pembangunan di Indonesia.

BAB V SUMBER DANA PEMBANGUNAN DESA. Pada bab ini dibahas mengenai sumber dana pembangunan desa yang berasal dari inpres Dana Bantuan Pembangunan Desa, dana perimbangan antara desa dan kabupaten dalam bentuk alokasi dana desa serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. selain itu, di bahas pula sumber dana pembangunan desa yang berasal dari APBN yang di kenal dengan Dana Desa serta pada bagian akhir bab ini di jelaskan tentang pendapatan asli desa yang di dalamnya terdapat hambatan dalam pelaksanaannya di desa..

BAB VI WISATA PEMBANGUNAN DESA. Di dalamnya menguraikan tentang asal mula wisata pembangunan desa, fenomena wisata pembangunan desa serta siapa saja yang merupakan wisatawan pembangunan selain itu, di bahas pula mengenai dampak wisata pembangunan desa serta upaya - upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak wisata pembangunan desa karena akhir - akhir ini wisata pembangunan desa sulit untuk di tiadakan bahkan fenomenanya semakin meningkat di masyarakat desa.

BAB VII BIAS PERKOTAAN DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA. Di dalam bab ini di uraikan mengenai interaksi desa - kota, fenomena bias perkotaan , bentuk bias perkotaan melalui kebijakan di bidang pertanian dan kesehatan serta dampak yang ditimbulkan bias perkotaan dalam pembangunan masyarakat desa.

BAB VIII KOOPTASI INSTITUSI LOKAL PEDESAAN. Dalam bab ini, salah satu institusi lokal pedesaan yang di kooptasi adalah lumbung desa. Dengan adanya kooptasi lumbung desa maka kemudian di bahas upaya revitalisasi lumbung desa. Di tengah upaya revitalisasi kemudian pemerintah menetapkan kebijakan program Raskin di masyarakat desa. Dalam pelaksanaan raskin di temukan adanya beberapa permasalahan dan upaya pemecahan masalahnya. Pembahasan berikutnya adalah indikator keberhasilan raskin serta pengembangan lumbung pangan masyarakat desa dan raskin.

BAB IX PATOLOGI PEMBANGUNAN DESA. Di jelaskan mengenai kondisi patologis pembangunan desa mulai dari pembahasan tentang terlalu mengutamakan pendekatan kelompok, adanya arogansi sektoral dalam pelaksanaan pembangunan desa serta mentalitas aparatur pembina yang kurang mendukung pelaksanaan pembangunan desa serta masih sering terjadi inkonsistensi regulasi dan implementasi dalam pembangunan desa yang berdampak merugikan masyarakat serta menghambat akselerasi pembangunan desa.

BAB X PENUTUP. Pada bagian akhir bab ini di uraikan pembangunan desa berkelanjutan yang di dalamnya di bahas mengenai perubahan paradigma pembangunan desa dari *top down* menuju pembangunan partisipatif (*bottom up*). Selain itu di bahas pula kemandirian desa dengan berbagai langkah yang perlu dilakukan seperti reorientasi birokrasi, sistem perencanaan melalui informasi komunitas, proyek pembangunan pedesaan sebagai eksperimen sosial, mobilisasi sumber - sumber sosio - kultural, pembinaan jaringan sosial , pengembangan teknologi pedesaan, serta peningkatan kreativitas dan inovasi masyarakat desa.

Bahwa buku ini tidak selesai begitu saja tanpa kontribusi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang turut memberikan kontribusi dalam penyelesaian buku ini. Terima kasih kepada Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN dan Direktur IPDN Kampus Sulawesi Selatan, karena atas arahan dan kesempatan yang diberikan sehingga penulisan buku ini dapat disetujui. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya khususnya rekan-rekan dosen, semoga segala bantuannya bernilai ibadah dihadapan Allah SWT.

Disadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga segala bentuk kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan. Demikian agar buku ini memberikan manfaat bagi kita semua dan senantiasa mendapat Rahmat dan Karunia dari Allah Swt. Amin.

Gowa, Juli 2017

Penulis

Umar Nain.